

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Akuntabilitas**

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanburry, 2003)

Sedangkan Menurut Rosidji (2008: 145) Jenis Akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:

a. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas Internal berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah yang setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

b. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas Eksternal melekat pada setiap organisasi atau lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan semua amanat

yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Mardiasmo (2002: 58) menyatakan bahwa Akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Implikasi teori akuntabilitas terhadap penelitian ini yaitu pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka terhadap masyarakat. Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik

merupakan isu menuju *clean governance* atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

## 2. Kesejahteraan Masyarakat

Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, program pembangunan PBB (UNDP) melalui terbitan serialnya sejak awal tahun 1990-an mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan tingkat pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan usia harapan hidup yang dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya alat ukur ini diperluas kegunaannya pada tingkat yang lebih rendah yaitu pada level kabupaten/kota (Gregorius, 2011). *United Nations Development Programme (UNDP)* mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Laporan ini menganggap bahwa pembangunan manusia pada hakekatnya adalah suatu proses memperbesar pilihan-pilihan manusia. Indikator tersebut dikenal dengan *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Human Development Index (HDI)* merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan antarnegara ataupun antardaerah (Todaro,2009:57).

Salah satu keuntungan HDI adalah, indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara/daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia. HDI juga menyampaikan bahwa pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Indikator kesenjangan pembangunan dan pemerinkatan yang baik harus memasukkan variabel kesehatan dan pendidikan dalam pengukuran kesejahteraan yang tertimbang, dan bukan hanya melihat tingkat pendapatan saja. HDI merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah (Todaro,2003:71).

### **3. Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja bersifat rutin. Belanja modal diklasifikasikan dalam dua kelompok, kelompok pertama adalah belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat langsung dinikmati masyarakat misalnya pembangunan jembatan, pembelian ambulan untuk umum dan lain-lain. Kelompok kedua adalah belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan langsung oleh aparatur misalnya pembangunan gedung dewan, pembelian mobil dinas dan lain-lain. Hampir semua anggaran

belanja modal mengandung komitmen adanya pengeluaran dalam jangka yang cukup panjang.

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Halim (2008), menyatakan bahwa kata investasi dapat diartikan macam-macam tergantung pada titik pandang atau konteks mengartikannya. Dalam bahasa ekonomi makro investasi dapat diartikan berbeda dengan bahasa ekonomi mikro, dan dapat berbeda pula dengan bahasa akuntansi. Dalam bahasa akuntansi pada konteks jenis belanja/biaya, investasi dapat dimunculkan dari adanya perbedaan antara *revenue expenditure* dan *capital expenditure*. Investasi termasuk dalam pengertian belanja modal adalah *capital expenditure*, yang didefinisikan sebagai belanja/biaya/ pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Dalam PP No. 58 tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya.

#### **4. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (UU Nomor 33 Tahun

2004). Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya serta mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, 3) Pinjaman Daerah, dan 3) Lain-lain Penerimaan yang sah. Dana perimbangan ini merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari alokasi pemerintah. Dalam mengalokasikan pembiayaan ini, agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah, pemerintah pusat harus memperhatikan kondisi keuangan masing-masing daerah, sehingga alokasi pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhan pemabangunan daerah (Sidik dalam Musthafa, 2005).

Menurut Mardiasmo (2006), Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyuruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan. Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana bagi

hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Aprizay dkk, 2014).

a. Dana Alokasi Umum (DAU),

Menurut PP No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sumber Daya Alam. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus sebagai salah satu bentuk Dana Perimbangan merupakan dana yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.

c. Dana Bagi Hasil.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, DAK adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

## 5. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2012), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah sehingga

kemakmuran masyarakat meningkat. Wahyu Hidayat (2017) Pertumbuhan ekonomi adalah aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sering dijadikan indikator kemajuan ekonomi, pada sebagian negara ternyata menyisakan berbagai persoalan. Di beberapa negara berkembang tujuan tersebut kadang menjadi dilema antar mementingkan pertumbuhan ekonomi atau terjadinya ketimpangan pendapatan dan persoalan kemiskinan. Asra (2003), pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa persoalan kesenjangan pendapat dan kemiskinan dapat berjalan beriringan. Banyak negara sedang berkembang termasuk Indonesia yang mempunyai pertumbuhan tinggi diatas 7% tahun pada tahap awal pembangunannya, tetapi situasi menyebabkan meluasnya kesenjangan pendapatan dan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk lebih mementingkan pengurangan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sirilius Seran (2016) Para ahli ekonomi meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah indikator untuk menilai kemajuan perekonomian sebuah daerah/bangsa/negara. Atas dasar ini maka setiap Negara berusaha untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dengan cara salah satunya adalah investasi dilakukan pada sektor infrastruktur dan sektor-sektor produktif ekonomi lainnya. Todaro (2000:232) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan

output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Dengan pengertian ini, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis terkait dengan *output* total (GDP) dan aspek jumlah penduduk. Pada jangka panjang, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam angka tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (*selfgenerating*). World Bank (2007:44-45) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *output* total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau diikuti oleh perubahan struktur perekonomian atau tidak. Secara aritmatika, sumber pertumbuhan dapat dibedakan menjadi pertumbuhan yang disebabkan oleh barang modal, tenaga kerja dan perubahan produktivitas dari faktor produksi tersebut. Perubahan produktivitas ini menjelaskan adanya perbedaan antar wilayah sedangkan yang mempengaruhi produktivitas itu sendiri adalah kemajuan teknologi.

## **6. Disparitas Pendapatan**

Disparitas pendapatan merupakan hal yang wajar dalam konsep pembangunan nasional. Pada tahap awal pembangunan ekonomi nasional, perbedaan laju pertumbuhan regional yang cukup besar antar provinsi di Indonesia telah mengakibatkan disparitas dalam distribusi pendapatan antar Provinsi. Peningkatan pendapatan perkapita memang

menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah merupakan masalah besar di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Setiap daerah yang melaksanakan pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan masyarakat luas.

Disparitas pendapatan sendiri dipergunakan walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor. Tetapi, para ahli ekonomi klasik menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertumbuhan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan kepada pemisalan ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan (Sukirno, 2010).

Disparitas adalah tingkat ketidakmerataan pendapatan antar kabupaten/kota. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab ketidakmerataan antar daerah ini, antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar daerah, perbedaan kondisi geografis antar daerah dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah (Tambunan, 2003). Thee Kian Wie (dalam

Hartono, 2008) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi menjadi:

- a. Ketimpangan pembagian pendapatan antargolongan penerima pendapatan (*size distribution oncome*).
- b. Ketimpangan pembagian pendapatan antardaerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban-rural income disparities*).
- c. Ketimpangan pembagian pendapatan antardaerah (*regional income disparities*).

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis & Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil
1.	Dwi Saraswati (2018)	Variabel Dependen : Pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Dana perimbangan tidak dapat memoderasi hubungan PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.
2.	Yasa dan Arka (2015)	Variabel Dependen : Kesejahteraan Masyarakat Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah	Disparitas pendapatan antardaerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

No	Penulis & Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil
	Yasa dan Arka (2015)		kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali.
3.	Tri Wahyono (2017)	Variabel Dependen : Kesejahteraan Masyarakat Variabel Independen : Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas pendapatan antardaerah	Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Disparitas Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
4.	Rifaldi Nanda Jaka Prasetya (2017)	Variabel Dependen : Tingkat Pengangguran Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi	PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. DBH berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.
5.	Syukuri dan Hinaya (2019)	Variabel Dependen : Anggaran Belanja Modal Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	pertumbuhan ekonomi (X1), pendapatan asli daerah (X2), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD (X2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi (X1), DAU (X3) dan DAK (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y).

No	Penulis & Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil
6.	Budianto dan Stanly (2016)	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen : PAD dan Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
7.	Dewi Rosalina dan Vekie (2019)	Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi mampu menekan tingkat kemiskinan di Kota Bitung, Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bitung akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Walaupun ada kenaikan kemiskinan akibat dari adanya kenaikan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat akan tetapi tidak berpengaruh signifikan.
8.	Luh Putu dan I Gst (2016)	Variabel Dependen : Kesejahteraan Masyarakat Variabel Independen : Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi	Infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali. Infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja secara langsung memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

No	Penulis & Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil
	Luh Putu dan I Gst (2016)		terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Sedangkan, variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.
9.	Muhammad Syukri dan Didiharyono (2018)	Variabel Dependen : Tingkat Kemajuan Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan dan PMA	PAD (X1), dana perimbangan (X2) dan PMA (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y). Dan pengujian model secara parsial, hanya PAD (X1) dan dana perimbangan (X2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y). Sedangkan, PMA (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y).
10.	Riko dan Rafiudin (2015)	Variabel Dependen : Alokasi Belanja Modal Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan	PAD, DAU, DAK, DBH, dan Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
11.	Putri Retno (2017)	Variabel Dependen : Anggaran Belanja Modal Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Simultan.

No	Penulis & Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil
	Putri Retno (2017)	dan Alokasi Umum	Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.
12.	Sasana (2009)	Variabel Dependen : Kesejahteraan Masyarakat Variabel Independen: Pertumbuhan ekonomi, Kesenjangan Antardaerah, dan Tenaga Kerja Terserap	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat, Kesenjangan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat,
13.	Yasa,dkk (2015)	Variabel Dependen : Kesejahteraan Masyarakat Variabel Independent : Kinerja Keuangan Daerah	kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan nyata terhadap kinerja pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
14.	Arini (2016)	Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Variabel Independen :	Belanja Modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal memiliki

No	Penulis & Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil
	Arini (2016)	Belanja Modal	pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

### C. Kerangka pemikiran

Penelitian ini menggunakan Variabel Independen Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah dengan Variabel Dependen yaitu Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Arini (2016) Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Menurut Jayastra,dkk (2015) Hubungan Dana Perimbangan dengan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan pembangunan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah. Maka dalam penelitian ini mengambil hipotesis dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Awandari dan Indrajaya (2016) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan peningkatan pendapatan yang terjadi maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi

kebutuhannya menjadi lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat. Maka dalam penelitian ini mengambil hipotesis pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Yasa dan Arka (2015) Kesenjangan pembangunan antarwilayah merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Kesenjangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya kesenjangan/disparitas antarwilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah. Maka dalam penelitian ini mengambil hipotesis disparitas pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

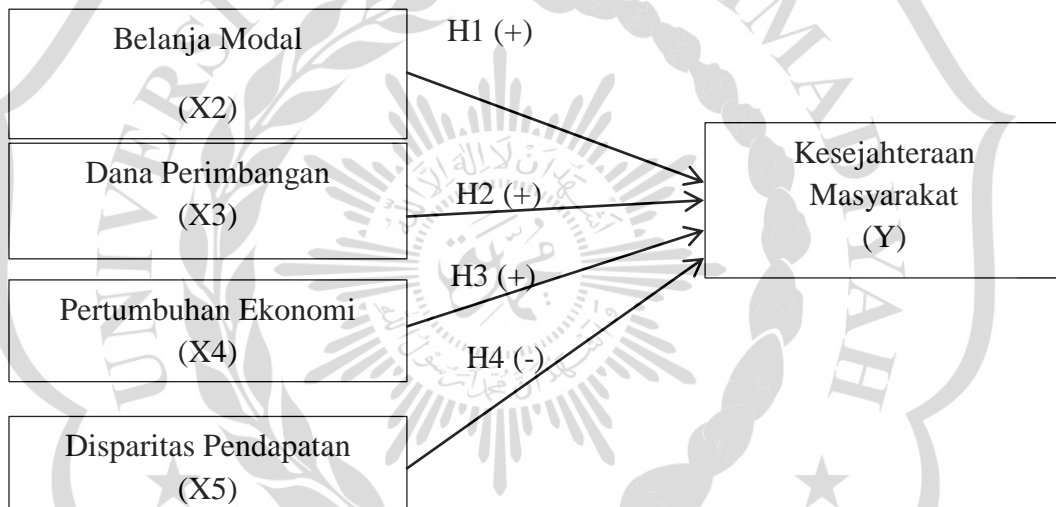
Menurut Tjokroamidjojo (2000) Hubungan teori akuntabilitas dengan penelitian ini dengan menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dan individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggungjawaban. Hal ini berkaitan dengan penelitian pengaruh kinerja keuangan, belanja modal, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah. Judul mengacu

pada proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan

Kerangka pemikiran teori tersebut adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**



#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan uraian di atas dan kerangka konseptual, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Hubungan Belanja Modal dengan Kesejahteraan Masyarakat**

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal

memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini (yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan lebih intensif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur, sarana maupun prasarana. Dengan meningkatkan alokasi anggaran belanja modal ke hal-hal yang produktif bukan ke hal-hal yang bersifat konsumtif saja, karena belanja modal yang dilakukan pemerintah secara langsung dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan secara tidak langsung juga memberikan dampak pada peningkatan pendapatan perkapita melalui program-program padat karya kepada masyarakat. Budiana dan Setiawan (2015) melakukan penelitian Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. Hasil Penelitian menyatakan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Mirza (2012) melakukan penelitian Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Hasil Penelitian menyatakan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H1 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

## 2. Hubungan Dana Perimbangan dengan Kesejahteraan Masyarakat

Halim (2007) bahwa peningkatan dana perimbangan memberikan dampak yang searah dengan peningkatan keserasian anggaran. Besarnya dana perimbangan dari APBN yang dialokasikan pada APBD atau ditransfer ke daerah tersebut sekalipun sudah cukup signifikan dan penyebarannya sudah diupayakan berimbang (berdasar *formula* tertentu yang terus disempurnakan), namun dirasakan oleh beberapa daerah jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab itu, beberapa daerah berkeinginan dan berupaya meningkatkan penerimaan dan anggaran pembangunan, baik melalui pajak dan retribusi baru maupun penerimaan bukan pajak dan bukan retribusi. Jayastra,dkk (2015) Penelitian menunjukkan bahwa Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Swandewi (2014) mendapatkan hasil dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

## 3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran keadaan perekonomian suatu daerah, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan merupakan suatu gambaran dari hasil kerja pemerintah baik itu nasional maupun daerah dalam mensejahterakan dan

meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan memperbesar kapasitas ekonomi PDRB (*Produk Domesti Regional Bruto*). Sehingga dengan PDRB yang tinggi maka akan tercipta *trickle down effect* sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Yasa dan Arka (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Wijayanti dan Darsana (2015) menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif antara variabel pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

H3 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

#### **4. Hubungan Disparitas Pendapatan Antardaerah dengan Kesejahteraan Masyarakat**

Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Kesenjangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya kesenjangan/disparitas antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar

wilayah. Patta (2012) dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan negatif antara distribusi pendapatan dengan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan. Yasa dan Arka (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali dalam penelitian menunjukkan bahwa Disparitas pendapatan antardaerah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

H4 : Disparitas Pendapatan berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat

